



ISSN 2087-2070
Volume 12, Nomor 12, April 2016

KOM & REALITAS SOSIAL



JURNAL ILMU KOMUNIKASI

JIK | Vol.12| No.12| Hlm. 1-81 | Bandar Lampung, April 2016 | ISSN 2087-2070

Diterbitkan Oleh :
Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Bandar Lampung

KOM DAN REALITAS SOSIAL

JURNAL ILMU KOMUNIKASI

Terbit dua kali setahun, setiap bulan April dan Oktober.

Diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Bandar Lampung

ISSN: 2087-2070

Penanggung Jawab

Rektor Universitas Bandar Lampung

Ketua Penyunting

Prof. Dr. Khomsahrial Romli, M.Si

Wakil Ketua Penyunting

Dr. Wawan Hernawan , M.Pd

Penyunting Pelaksana

Prof. Dr. Khomsahrial Romli, M.Si

Dr. Wawan Hernawan , M.Pd

Noning Verawati, MA

Penyunting Ahli (Mitra Bestari)

Dr. Abdul Firman Assegaf, M.Si

(Universitas Lampung)

Drs. Sarwoko M.Si

(Universitas Lampung)

Dr. Udung M. Rasyid, M.Si

(Universitas Mercu Buana)

Dr. Farid Hamid M.Si

(Universitas Mercu Buana)

Dr. Mahyuzar M.Si

(Universitas Iskandar Muda)

Dr. Emrus, M.Si

(Universitas Pelita Harapan)

Pelaksana Tata Usaha

Masleha

Ririn Jamiah

Alamat Redaksi

Gedung Rektorat UBL Lt.6. Universitas Bandar Lampung, JL. ZA. Pagar Alam No.26,
Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Telp (0721)771331. Web: www.ubl.ac.id

DAFTAR ISI

Judul

Strategi Pencitraan Dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Teluk Betung Bandar Lampung
Oleh: Wawan Hernawan 1-11

Pergeseran Pemanfaatan Instagram Sebagai Media Bisnis *Online* (Studi Kasus Pada Akun @Schonehazzle)
Oleh: Noning Verawati 12-25

Peran Komunikasi Organisasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pekon Tugupapak Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus
Oleh: M. Fikri Akbar 26-40

Dinamika Komunikasi Organisasi Forum Joglo (Studi Kasus Terhadap Dinamika Komunikasi Internal dan Eksternal Organisasi Forum Joglo Kotagede Yogyakarta)
Oleh: Choirul Fajri 41-52

Terorisme Di Media Baru Indonesia (Analisis Framing Pemberitaan Terorisme Di Portal Berita Republika.co.id dan Kompas.com Tahun 2005-2013)
Oleh: Romika Junaidi 53-64

Peran Public Relations Dalam Konstruksi Citra Perguruan Tinggi Muhammadiyah Di Yogyakarta (Studi Kasus Peran Public Relations Dalam Konstruksi Citra Internasional Di Universitas Ahmad Dahlan)
Oleh: Novi Rahma Ilmiati 65-81

JIK	Vol.12	No.12	Hlm. 1-81	Bandar Lampung, April 2016	ISSN 2087-2070
-----	--------	-------	-----------	----------------------------	----------------

PENGANTAR REDAKSI

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Jurnal Ilmu Komunikasi Kom Dan Realitas Sosial Volume 12, Nomor 12, April 2016 telah terbit. Dalam nomor ini kami berusaha menampilkan hasil penelitian di bidang Ilmu Komunikasi yang ditulis oleh berbagai dosen serta civitas akademik ilmu komunikasi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Pertama melalui tulisan Wawan Hernawan tentang tema bahwa pembentukan citra yang baik pada perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Salah satu upaya dalam membangun keharmonisan hubungan antara perusahaan dan masyarakat dapat diusahakan dengan melaksanakan program-program *corporate social responsibility*. Artikel kedua ditulis oleh Noning Verawati dan Kristin Oktaviani yang memberikan sajian keilmuan mengenai media baru. Mengusung tema tentang pergeseran pemanfaatan Instagram sebagai media bisnis online dan mencoba mengetahui faktor-faktor yang mendukung fenomena pergeseran pemanfaatan tersebut. Tulisan selanjutnya mencoba untuk memaparkan mengenai peran komunikasi organisasi dalam sebuah organisasi pemberdayaan masyarakat. Tulisan ini ditulis oleh M Fikri Akbar. Masih dalam satu tema yang sama mengenai komunikasi organisasi artikel berikutnya ditulis oleh Choitul Fajri. Artikel ini mencoba menggambarkan mengenai dinamika komunikasi yang terjadi baik secara internal dan eksternal dalam suatu organisasi. Romika Junaidi dengan artikelnya berjudul Terorisme Di Media Baru Indonesia (Analisis Framing Pemberitaan Terorisme Di Portal Berita Republika.co.id dan Kompas.com Tahun 2005-2013) mencoba melihat konfigurasi pembedaan berita dengan landasan pisau analisis dari Robert Entman. Terakhir jurnal ini ditutup oleh artikel yang ditulis oleh Novi Rahma Ilmiati tentang peran *public relations* dalam konstruksi citra pada perguruan tinggi.

PERAN KOMUNIKASI ORGANISASI DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEKON TUGUPAPAK KECAMATAN SEMAKA KABUPATEN TANGGAMUS

M. FIKRI AKBAR, S.I.Kom, M.Si, M.M
Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Bandar Lampung
fikri.m.akbar@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini ingin mengetahui tentang bagaimana komunikasi organisasi yang ada pada sembilan organisasi pengembangan masyarakat yang berada di daerah Pekon Tugupapak, Semaka, Tanggamus. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berusaha mengungkap masalah dan situasi sehingga hanya berupa pengungkapan fakta-fakta yang ditemui di lapangan. Penelitian ini berlangsung di Daerah Pekon Tugupapak, Semaka, Tanggamus. Peranan komunikasi di dalam organisasi pemberdayaan masyarakat di daerah Pekon Tugupapak, Semaka, Kabupaten Tanggamus adalah sebagai berikut: (a) Peran makna informatif OMS Karyamuda Pekon Tugupapak dipandang sebagai suatu sistem pengolahan informasi, (b) Peran sarana regulasi peran ini berkaitan dengan peraturan yang berlaku untuk OMS Karyamuda dan aturan papan OMS Karyamuda, (c) peran sarana persuasif untuk mengatur OMS Karyamuda, kekuasaan dan otoritas tidak akan selalu membawa hasil seperti yang diharapkan, (d) peran makna integratif OMS Karyamuda Pekon Tugupapak berusaha untuk menyediakan saluran yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan sebuah pekerjaan yang baik.

Kata Kunci: Komunikasi Organisasi, Pemberdayaan masyarakat

PENDAHULUAN

Pada tahun 2011 Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Pekon Tugupapak Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus berhasil memperoleh penghargaan sebagai OMS terbaik tingkat nasional melalui program pemberdayaan masyarakat yaitu program RIS (Rural Infrastructure Services) PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat). Organisasi pada Pekon Tugupapak telah berjalan dengan sebagaimana mestinya karena menurut Schein (dalam Arni 2009) mengatakan bahwa organisasi merupakan suatu koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai beberapa tujuan umum melalui pembagian pekerjaan dan fungsi melalui hierarki otoritas dan tanggung jawab.

Pada Pekon Tugupapak koordinasi di antara masyarakat maupun sesama organisasi mampu membawa keberhasilan dalam sebuah program pemerintah. berjalan dengan baik sebuah organisasi salah satunya karena komunikasi dalam organisasi tersebut tidak terdapat noise atau gangguan. Komunikasi menurut Ruber (1988) merupakan suatu proses melalui mana individu dalam hubungannya, dalam kelompok, dalam organisasi dan dalam masyarakat menciptakan, mengirimkan dan menggunakan informasi untuk mengkoordinasi lingkungannya dan orang lain. Karena komunikasi organisasi telah berjalan dengan baik maka berpengaruh dengan proses pemberdayaan masyarakat pada Pekon Tugupapak. Pengkajian terhadap komunikasi organisasi memiliki arti penting mengingat bahwa komunikasi organisasi merupakan suatu disiplin studi yang dapat mengambil sejumlah arah yang sah dan bermanfaat. Dalam arti pengkajian akan memberikan manfaat tidak hanya bagi siapa saja yang ingin memahami perilaku organisasi secara lebih baik, tapi juga memiliki aspek pragmatis bagi orang-orang yang ingin memperbaiki kinerjanya sebagai peserta/anggota suatu organisasi. Studi komunikasi organisasi dapat memberikan landasan kuat bagi karier dalam manajemen, pengembangan sumber daya manusia, dan komunikasi perusahaan, serta tugas-tugas lainnya yang berorientasikan kepada manusia dalam organisasi (Pace & Faules, 2001: 25).

Kesembilan organisasi di Pekon Tugupapak tersebut sangat berperan penting terhadap keberhasilan program pemberdayaan infrastruktur yang telah mereka lakukan. Dapat dikatakan bahwa organisasi-organisasi tersebut yang memiliki andil besar terhadap keberhasilan tersebut. Oleh karena itu menjadi menarik bagi penulis untuk meneliti bagaimana komunikasi organisasi dari kesembilan organisasi pekon tersebut, serta

diharapkan menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi peran komunikasi organisasi dalam pemberdayaan masyarakat Pekon Tugupapak Kec. Semaka Kab. Tanggamus.

Komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi (Wiryanto, 2005). Komunikasi formal adalah komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi kepentingan organisasi. Isinya berupa cara kerja di dalam organisasi, produktivitas, dan berbagai pekerjaan yang harus dilakukan dalam organisasi. Misalnya: memo, kebijakan, pernyataan, jumpa pers, dan surat-surat resmi. Adapun komunikasi informal adalah komunikasi yang disetujui secara sosial. Orientasinya bukan pada organisasi, tetapi lebih kepada anggotanya secara individual.

Istilah organisasi berasal dari bahasa Latin *organizare*, yang secara harafiah berarti paduan dari bagian-bagian yang satu sama lainnya saling bergantung. Di antara para ahli ada yang menyebut paduan itu sistem, ada juga yang menamakannya sarana.

Everet M. Rogers dalam bukunya *Communication in Organization*, mendefinisikan organisasi sebagai suatu sistem yang mapan dari mereka yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, melalui jenjang kepangkatan, dan pembagian tugas.

Robert Bonnington dalam buku *Modern Business: A Systems Approach*, mendefinisikan organisasi sebagai sarana dimana manajemen mengoordinasikan sumber bahan dan sumber daya manusia melalui pola struktur formal dari tugas-tugas dan wewenang. Korelasi antara ilmu komunikasi dengan organisasi terletak pada peninjauannya yang terfokus kepada manusia-manusia yang terlibat dalam mencapai tujuan organisasi itu. Ilmu komunikasi mempertanyakan bentuk komunikasi apa yang berlangsung dalam organisasi, metode dan teknik apa yang dipergunakan, media apa yang dipakai, bagaimana prosesnya, faktor-faktor apa yang menjadi penghambat, dan sebagainya. Jawaban-jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah untuk bahan telaah untuk selanjutnya menyajikan suatu konsepsi komunikasi bagi suatu organisasi tertentu berdasarkan jenis organisasi, sifat organisasi, dan lingkup organisasi dengan memperhitungkan situasi tertentu pada saat komunikasi dilancarkan.

Sendjaja (1994) menyatakan peran komunikasi dalam organisasi adalah sebagai berikut:

- Peran informatif. Organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi. Maksudnya, seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik dan tepat waktu. Informasi yang didapat memungkinkan setiap anggota organisasi dapat melaksanakan pekerjaannya

secara lebih pasti. Orang-orang dalam tataran manajemen membutuhkan informasi untuk membuat suatu kebijakan organisasi ataupun guna mengatasi konflik yang terjadi di dalam organisasi. Sedangkan karyawan (bawahan) membutuhkan informasi untuk melaksanakan pekerjaan, di samping itu juga informasi tentang jaminan keamanan, jaminan sosial dan kesehatan, izin cuti, dan sebagainya.

- Peran regulatif. Fungsi ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Terdapat dua hal yang berpengaruh terhadap fungsi regulatif, yaitu:
a. Berkaitan dengan orang-orang yang berada dalam tataran manajemen, yaitu mereka yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan. Juga memberi perintah atau intruksi supaya perintah-perintahnya dilaksanakan sebagaimana semestinya.
b. Berkaitan dengan pesan. Pesan-pesan regulatif pada dasarnya berorientasi pada kerja. Artinya, bawahan membutuhkan kepastian peraturan tentang pekerjaan yang boleh dan tidak boleh untuk dilaksanakan.
- Peran persuasif. Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Adanya kenyataan ini, maka banyak pimpinan yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah. Sebab pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibanding kalau pimpinan sering memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya.
- Peran integratif. Setiap organisasi berusaha untuk menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Ada dua saluran komunikasi yang dapat mewujudkan hal tersebut, yaitu:
a. Saluran komunikasi formal seperti penerbitan khusus dalam organisasi tersebut (buletin, newsletter) dan laporan kemajuan organisasi.
b. Saluran komunikasi informal seperti perbincangan antar pribadi selama masa istirahat kerja, pertandingan olahraga, ataupun kegiatan darmawisata. Pelaksanaan aktivitas ini akan menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi yang lebih besar dalam diri karyawan terhadap organisasi.

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep yang berkembang dari masyarakat budaya barat sejak lahirnya Eropa modern pada pertengahan abad 18. Dalam perjalanannya sampai kini telah mengalami proses dialektika dan akhirnya menemukan konsep ke-masa kini-an, yang telah umum digunakan. Secara umum pemberdayaan dalam pembangunan meliputi proses pemberian kekuasaan untuk meningkatkan posisi sosial, ekonomi, budaya dan politik dari masyarakat yang bersifat lokal, sehingga masyarakat mampu memainkan peranan yang signifikan dalam pembangunan.

Perspektif partisipasi hendaknya diarahkan untuk keberdayaan masyarakat, bukan justru untuk mobilisasi. Hal tersebut sesuai pernyataan Tjokrowinoto (1987:44-45) yakni : Partisipasi telah cukup lama menjadi acuan pembangunan masyarakat. Akan tetapi makna partisipasi itu sendiri seringkali samar-samar dan kabur. Partisipasi malahan sering berbentuk mobilisasi dengan pendekatan cetak biru (blueprint) atau pendekatan yang datangnya dari atas. Dengan kondisi ini, peran serta masyarakat “terbatas” pada implementasi atau

penerapan program, masyarakat tidak dikembangkan dayanya menjadi kreatif dari dalam dirinya dan harus menerima keputusan yang sudah diambil. Sehingga makna partisipasi menjadi pasif. Jika partisipasi yang ada ternyata berasal dari atas, maka ia akan menjadi mobilisasi, yakni sekedar alat untuk mencapai apa yang diinginkan. Akan tetapi jika partisipasi sungguh-sungguh berasal dari bawah, maka akan mengarah pada distribusi kekuasaan atau pemberdayaan yang akan memungkinkan masyarakat memperoleh buah pembangunan yang lebih besar.

Dari pemahaman tentang pentingnya mengedepankan proses pembangunan yang memberdayakan masyarakat, maka partisipasi masyarakat menjadi penting guna kelangsungan proses pembangunan itu sendiri, sebagaimana Uphoff (dalam Cernea, 1988:461) menyatakan penting menyesuaikan perencanaan dan pelaksanaan program dengan kebutuhan dan kemampuan penduduk yang diharapkan untuk meraih manfaat darinya, sehingga mereka tidak lagi harus diidentifikasi sebagai “kelompok sasaran”. Harus memandang mereka sebagai “pemanfaat yang diharapkan”. Merekalah yang akan diuntungkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Namun demikian, partisipasi hendaknya diletakkan pada posisi yang proporsional dan sesuai dengan hakikatnya pada masyarakat dalam suasana keberdayaan yang aktif, bukan secara pasif, apalagi sampai dimobilisasi oleh outsider stakeholder. Lebih jelasnya dapat disimak dari pernyataan Uphoff dalam Cernea (1988:500), yang menyatakan: Salah satu paradoks dalam mendorong partisipasi adalah bahwa dalam mempromosikan pembangunan dari bawah (*bottom up planning*), justru sering pula membutuhkan upaya dari atas. Hal ini terlihat dalam wacana yang menggunakan pendukung atau promotor yang direkrut, dilatih dan ditempatkan di lapangan dari pusat untuk bekerja dengan penduduk pedesaan dan mengembangkan kapasitas organisasi diantara mereka. Dengan demikian, pemberdayaan adalah partisipasi aktif, nyata dan mengutamakan potensi-potensi masyarakat yang dinamis dan hasilnya benar-benar terukur, sehingga pemberdayaan menjadi upaya korektif terhadap konsep pemberdayaan yang pasif itu. Pemberdayaan bertujuan menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dengan mengandalkan daya yang ada padanya. Dengan demikian makna partisipasi sebagaimana dinyatakan diatas, akan mengacu pada proses aktif, dimana masyarakat penerima (beneficiaries) mempengaruhi arah dan pelaksanaan proyek pembangunan daripada hanya sekedar menerima manfaatnya saja.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian, terutama dalam usaha untuk menyelesaikan masalah penelitian. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang berusaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta. Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kilas peristiwa pada masa sekarang. Tujuannya adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta lingkungan antara fenomena yang diselidiki. (Nasir, 1988:63). Sedangkan pendekatan kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor dalam (Moleong, 2004) dijelaskan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konsep khusus yang alamiah.

Jadi penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah suatu penelitian yang mengungkapkan fakta apa adanya tentang suatu obyek, gejala, keadaan, dengan melakukan pembacaan, menguraikan, menginterpretasikannya dan kemudian barulah diambil suatu kesimpulan dalam bentuk tulisan yang sistematis. Alasan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena penelitian ini mengungkap apa adanya yang terjadi dilapangan, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Selain itu, penelitian ini lebih menekankan pada proses daripada hasil tanpa maksud menguji hipotesa dan peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain dapat menjadi alat pengumpul data utama. Ruang lingkup penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan dan merupakan tempat yang dipilih sebagai objek penelitian. Penelitian ini mengambil lokasi di Pekon Tugupapak Kec. Semaka Kabupaten Tanggamus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ada beberapa organisasi sosial yang terlibat aktif dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui program RIS PNPM di Pekon Tugupapak, diantaranya:

1. Karang taruna
2. Risma
3. PHST
4. Kelompok yasinan bapak-bapak
5. Muslimat Ibu-ibu
6. Kelompok seni kuda lumping
7. Solawatan janengan
8. LPM
9. OMS Karya muda

Penyelenggaraan program RIS-PNPM Mandiri melibatkan berbagai unsur pelaksana dan instansi terkait yang berjenjang dari tingkat desa, kabupaten, provinsi sampai tingkat pusat. Pengelolaan RIS-PNPM Mandiri di Pekon Tugupapak dilaksanakan oleh OMS Karyamuda, KPP, dan KD yang dipilih dan dibentuk oleh masyarakat dalam musyawarah desa. Organisasi ini melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan mengacu pada pedoman yang sudah ditetapkan dengan didampingi dan dibimbing oleh fasilitator. Organisasi ini harus menyebarluaskan hasil pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat luas melalui papan-papan informasi. OMS Karyamuda, KPP dan KD yang sudah dibentuk dalam RIS-PNPM Mandiri ini diharapkan dapat berfungsi secara berkelanjutan. Organisasi ini membantu dalam pengembangan pembangunan di Pekon Tugupapak atau mengimplementasikan PJM yang sudah ada melalui berbagai program pembangunan lainnya baik yang di biayai oleh pemerintah pusat, Provinsi, kabupaten atau masyarakat Pekon Tugupapak sendiri. Berdasarkan temuan penelitian, dapat diketahui perbedaan struktur kepengurusan tiap tahun. Adanya perubahan format dan komposisi sumber daya menunjukkan bahwa program ini di awal belum ada keseragaman dan konsep para pelaksana secara mutlak.

1. Peran informatif

Pada program RIS PNPM, OMS Karyamuda dipandang sebagai suatu sistem yang memeroses informasi terkait program pemberdayaan ini. Maksudnya, seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik dan tepat waktu. Informasi yang didapat memungkinkan setiap anggota organisasi dapat melaksanakan pekerjaannya secara lebih pasti. Orang-orang dalam tataran manajemen

membutuhkan informasi untuk membuat suatu kebijakan organisasi ataupun guna mengatasi konflik yang terjadi di dalam organisasi.

Peran informatif ini tampak pada saat intensnya proses komunikasi antara kepengurusan OMS karyamuda dengan fasilitator pemberdayaan dan fasilitator teknik. Fasilitator pemberdayaan berperan sebagai pemberi informasi terkait keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program RIS PNPM. Sementara fasilitator teknik berperan sebagai pemberi informasi terkait detail bangunan yang hendak dibangun. Hal ini sebagaimana pernyataan yang di sampaikan oleh ketua OMS, Slamet Budiyo sebagai berikut:

“ya kita taunya dari FM gimana program ini harus berjalan, apa yang disiapkan, yang dibutuhkan, gimana pencairan dan gimana kita kerja semuanya informasi dari fm. Info ini nanti kita jelasin juga ke organisasi yang mau ngerjain kerjaan ini nanti. Ke masyarakat juga kita kasih tau”.

Selain itu, menurut salah satu masyarakat yang peneliti temui saat observasi, bernama mbah kasim, menuturkan bahwa:

“tau ada proyek ini dari anak saya yang jadi OMS. Bagus ini. Mereka kasih tau kapan dibangun kapan juga beresnya”

Dalam hal ini, organisasi menjadi pintu keluar masuknya informasi mengenai pelaksanaan informasi mengenai pelaksanaan program RIS PNPM. Informasi tersebut tidak hanya memberikan pendidikan program kepada organisasi dalam hal ini OMS saja, akan tetapi bagaimana OMS juga mampu menyampaikan informasi kepada masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh anggota OMS Karyamuda, Hazrori bahwa:

“OMS yang ngerencanakan mau dibangun jembatan kemarin. Kami tau semua kelengkapan administrasinya dari fm. Kalo rembug dan musdes itu fm pemberdayaan yang ngarahin. Kalo ukuran jembatan sama RAB itu sama fm teknik”

“kalau kami sudah beres perencanaan, kemarin kami tawarin ke organisasi yang ada di sini. Soalnya kalau masyarakat langsung takutnya malah ribut. Kalo ini kan mereka kami tawarin trus pada mau”.

Sebagaimana yang disampaikan oleh ketua OMS, beliau mengatakan bahwa:

“semua informasi biasanya di OMS pusatnya. Karena kitakan dikasih tau langsung, biasanya juga ada TAM yang kesini untuk ngawasin dan ngebimbing kita juga, masyarakat juga kalo ada apa-apa tanyanya ke saya atau anggota oms lainnya”.

Dari beberapa penuturan tersebut dapat diambil data bahwa OMS Karyamuda yang ada di Pekon Tugupapak menjalankan fungsi dan peran informati terhadap masyarakat mengenai program pemberdayaan masyarakat. OMS menjadi titik informasi berkumpul lalu kemudian tersampaikan kepada masyarakat. Masyarakat mampu memahami apa yang terjadi di desanya terkait pembangunan infrastruktur berbasis pemberdayaan masyarakat. Hal ini menjadikan oms karyamuda mampu menjadi perantara yang baik terhadap segala tahapan program RIS PNPM di pekon Tugupapak.

2. Peran regulatif

Proses regulasi OMS Karyamuda menginduk dengan aturan-aturan dari program RIS PNPM. Dalam tataran manajemen, yang menjadi pengurus OMS adalah orang-orang yang ada di Pekon Tugupapak yang dianggap mampu bertanggung jawab dan memiliki latarbelakang pendidikan minimal SMP untuk ketua dan SD untuk anggota lainnya. Hal ini karena diharapkan mereka yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan. Seperti yang diungkapkan oleh ketua OMS Karyamuda bahwa:

“kemarin milih ketua lewat musdes. Awalnya gak mau karena saya takut ribet urusannya. Tapi kata fm pemberdayaan dan juga pak kades minta jadi saya bersedia untuk jadi ketua. Yang SI jarang, kalau ada juga paling jadi PNS.kan PNS gak boleh. Saya D3 jadi mau gak mau ya saya harus mau”.

Selain itu, menurut beberapa menuturan masyarakat, bahwa

“mau sih jadi pengurus OMS. Tapi gak punya ijazah. Kata fm saat musdes itu ijazah pengurus OMS terutama ketua nanti dilampirin di proposal proyeknya.”

Tidak hanya syarat latarbelakang pendidikan, kepengurusan OMS juga harus ada keterwakilan perempuan sebagai pengurusnya. Keterwakilan ini mutlak harus dipenuhi sebanyak 40% dari jumlah pengurus.

Hal ini disampaikan oleh ketua OMS Karyamuda:

“kalau perempuan memang wajib 40% nya. Itu ketat banget lho aturannya. Jangankan pengurus, yang hadir juga harus ada 40% perempuan. Sebenarnya sulit mau ngajaknya, tapi ya akhirnya asal tunjuk aja. Jarang sih disini yang mau ikut”.

Aturan tegas mengenai kepengurusan OMS ini disampaikan oleh FM pemberdayaan berdasarkan instruksi langsung dari dinas PU sebagai dinas yang mengurus program pemberdayaan untuk pembangunan infrastruktur desa. Alasan latar belakang pendidikan pengurus OMS adalah terkait bagaimana kemampuan pengurus OMS menerima informasi

yang disampaikan FM dan tim ahli manajemen. Kemampuan ini harus dibuktikan dengan melampirkan ijazah dalam RKM dan PJM yang disusun oleh OMS kepada satker.

Informasi terkait hal ini adalah mengenai apa saja yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan oleh pengurus OMS Karyamuda. Yang seharusnya dilakukan dan tidak seperti yang disampaikan oleh ketua OMS Karyamuda bahwa:

“kami tau kalo jadi pengurus OMS tidak boleh mengambil bagian dana yang didapatkan oleh desa”.

Berdasarkan beberapa data yang berhasil dihimpun, peran regulatif membentuk keteraturan organisasi secara formal ataupun non formal dari segi aturan tertulis atau tidak tertulis yang seharusnya menjadi pedoman OMS Karyamuda dalam mengimplementasikan program pemberdayaan.

3. Peran persuasif

Dalam mengatur OMS Karyamuda, kekuasaan dan kewenangan yang mereka miliki sebagai poros penggerak program RIS PNPM tidak selalu menyalahgunakan kekuasaannya untuk mengatur secara kaku kepada masyarakat Pekon Tugupapak. Peran yang dimainkan adalah melakukan tindakan persuasif terutama yang dilakukan oleh ketua OMS Karyamuda, Slamet budyono seperti pernyataannya berikut ini:

“disini gak bisa kalo sifatnya nyuruh, ngatur dan dikit-dikit bilang wajib apalagi nyuruhnya pake titip omongan. Saya selalu bilang langsung ke orangnya, ngajak aja. Kalo gak mau ya sudah. Saya maklum, gak bisa maksa karena semua orang memang punya kesibukan sendiri kan”.

“misal mau musdes, saya anter undangan sekaligus ngomong ngajak langsung. Itu biasanya mereka hadir dan kasih pendapat. Jadi gak titip undangan kayak undangan kawinan.

Dari kedua pernyataan tersebut, tampak bahwa kepemimpinan mempengaruhi bagaimana cara mengkoordinir masyarakat dengan sentuhan yang tidak kaku dan bersifat memaksa. Senada dengan ketua OMS, Anggota OMS Karyamuda berikut ini juga mengungkapkan hal yang serupa,

“kami kalo lagi duduk-duduk di gardu sekaligus ngobrol dan ngingetin masyarakat biar apa yang jadi uneg-uneg mereka bisa disampaikan di forum. Gak Cuma kita yang di gardu aja yang denger.”

Tidak hanya melakukan peran persuasif kepada masyarakat yang berjenis kelamin laki-laki saja, OMS Karyamuda melalui pengurusnya yang perempuan juga melakukan hal ini. Seperti yang disampaikan oleh Suratmi, selaku bendahara OMS Karyamuda bahwa:

“mengenai keterlibatan perempuan di sini bisa maksimal karena ibu kadesnya rajin ngedatengin ibu-ibu sambil ngobrol. Ibu kadesnya juga aktif sih orangnya,, terbuka. Jadi memang banyak kegiatan perempuan-perempuan sini yang biasa dijalankan. Makanya program ini juga bisa ngerangkul perempuan.”

“biasanya ngajak ibu-ibu kan susah ya dimana-mana, karena ibu-ibu ngurusin rumah, anak-anak, belum lagi kalo yang ikut ke sawah. Tapi kami cari waktu yang pas buat mereka. Kalaupun gak ikut musdes, kami manfaatin saat pengajian atau maen voli disinggung dikit soal kerjaan program ini. Mereka juga bagus responnya”

Dari pernyataan-pernyataan tersebut peran persuasif bertujuan mengubah atau memengaruhi kepercayaan, sikap dan perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh penyampai pesan, dalam hal ini ada OMS Karyamuda. Keberhasilan penyampaian pesan mengenai program pemberdayaan ini dipengaruhi oleh substansi pesan tentang program RIS PNPM ini, sumber pesan, dimana yang menjadi sumber pesan adalah ketua OMS Karyamuda dan ibu kepala desa. Orang-orang yang memiliki posisi dan pengaruh di Pekon Tugupapak. Posisi strategis mereka dianggap paling mewakili sumber pesan, karena selain bersumber dari mereka masyarakat cukup berhati-hati menelaah informasi tentang tahapan program pemberdayaan di Pekon Tugupapak.

Selain itu, lingkungan yang saling percaya dan penuh kekeluargaan juga mempengaruhi peran persuasif ini menjadi langkah tepat selama proses implementasi program. Dan terakhir, faktor yang mempengaruhi juga terkait kesinambungan pesan mengenai tahapan pelaksanaan program RIS PNPM. Ketika program ini tidak intens dan tidak menjadi fokus perhatian masyarakat Pekon Tugupapak maka bukan tidak mungkin penyampaian pesan mengenai program juga mudah dilupakan bahkan tidak dilaksanakan sehingga keterlibatan masyarakat dalam program pemberdayaan sangat minim.

4. Peran integratif.

Organisasi masyarakat setempat (OMS) Karyamuda berusaha berusaha untuk menyediakan saluran yang memungkinkan anggota OMS dan organisasi desa yang

bertanggungjawab melaksanakan pekerjaan fisik infrastruktur dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik.

Seperti yang disampaikan oleh ketua OMS Karyamuda, mengenai peran integratif ini,

“kami ada papan pengumuman yang ditaro di rumah saya. Ya harusnya program ini ada sekretariat program, tapi gak ada. Sekretnya di rumah aja. Banyak ang hilir mudik di sini.”

“biasanya papan pengumuman itu isinya foto-foto kegiatan, poster dari dinas, rencana pembangunan berapa-berapa panjang dan luas bangunan yang mau dibangun nantinya. Tapi justru ini ada kelemahannya mbak, banyak wartawan yang akhirnya tau banyak informasi dan semakin nyari-nyari kekurangan.”

Dari pernyataan tersebut, saluran informasi sesungguhnya telah dipahami oleh OMS, namun dengan segala keterbatasan tempat sehingga sekretariat yang seharusnya ada dan menjadi sentral informasi dapat dialih fungsikan di rumah ketua OMS Karyamuda. Saluran informasi ini memberikan laporan kemajuan pelaksanaan program RIS PNPM. Saluran ini bisa diakses semua lapisan masyarakat bahkan pihak eksternal yang memiliki kepentingan positif ataupun negatif. Selain itu, tempat informasi tersebut memberikan tambahan data sekunder untuk para FM pemberdayaan dan FM teknik serta para pengawas TAMK untuk mengecek kemajuan program benar-benar meberdayakan masyarakat atau tidak.

Tidak hanya saluran informasi secara formal, saluran non formal pun ada di Pekon Tugupapak terikait program pemberdayaan RIS PNPM ini, hal tersebut di jelaskan oleh ketua OMS Karyamuda,

“.. selain itu kami ngomongin program ini dimana-mana lho mbak, pas ketemu dipasar, pengajian, latihan tapak suci, malah pas ketemu orang di jalan pas depan bangunan ya kami ngebahas. Misal ada yang dianggap kurang geser dikit atau agak miring dikit bangunannya, ya namanya kan kitakita aja yang bangun. Sambil belajar juga.”

Tidak hanya data dari ketua OMS Karyamuda, masyarakat juga mengatakan bahwa,

“kita mah ngobrolnya kalo gak soal harga kelapa, coklat ya ngomongin bangunannya RIS PNPM. Soalnya kan ikut ngebangun juga. Jadi taulah soal bangunan itu”.

Berdasarkan pemaparan para informan, dapat disimpulkan bahwa peran integrati adalah ketika OMS Karyamuda memiliki tempat atau dalam hal ini disebut sebagai saluran informasi baik forum formal ataupun non-formal seperti tegur sapa dengan para masyarakat. Saluran inipun berfungsi dengan maksimal, sehingga implikasinya adalah kepahaman

masyarakat Pekon Tugupapak akan proses pemberdayaan melalui program RIS PNPM. Pemahaman ini menjadikan keterlibatan aktif masyarakat pekon baik laki-laki maupun perempuan terhadap pekerjaan infrastruktur yang mereka bangun.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas sebelumnya, peranan komunikasi organisasi dalam program pemberdayaan RIS PNPM menjadikan OMS Karyamuda di Pekon Tugupapak tampil sebagai OMS terbaik tingkat nasional. Prestasi ini tentu saja didukung oleh keberhasilan OMS dalam mengimplementasikan tahapan-tahapan program RIS PNPM. Untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan program yang sesuai dengan tujuan dan sasarannya dibutuhkan kegiatan persiapan yang matang dan dapat diketahui serta dipahami oleh semua pihak yang terlibat, baik di jajaran pemerintahan maupun masyarakat yang akan berperan sebagai perencana, pelaksana dan pemanfaat. Terkait dengan hal itu, perlu ditumbuh kembangkan pemahaman dan kesadaran seluruh pelaku tentang apa, mengapa, dan bagaimana dari setiap tahapan kegiatan yang dilakukan. Pelaksanaan sosialisasi secara berjenjang, pemberdayaan serta kampanye penyadaran publik merupakan kegiatan awal yang menjadi tolok ukur pencapaian keberhasilan program. Dengan demikian hakekat pemberdayaan masyarakat tidak berarti hanya menyerahkan keputusan kepada masyarakat, namun juga mendorong masyarakat paham terhadap resiko, tanggung jawab dan hak serta kewajiban yang timbul sebagai konsekuensi atas keputusan yang akan diambil serta mau untuk melaksanakan keputusan tersebut.

Setelah sosialisasi dilakukan sampai dengan tingkat desa, masyarakat melaksanakan perencanaan atas jenis infrastruktur yang disepakati. Kegiatan ini merupakan suatu rangkaian yang terdiri dari identifikasi permasalahan, penyusunan PJM Pronangkis 3 (tiga) tahun, penentuan usulan, asistensi dan verifikasi, finalisasi usulan, perencanaan teknis, dan penyusunan anggaran. Dalam Program *Rural Infrastructure Support-PNPM* (RIS-PNPM) Mandiri, tahap ini sepenuhnya dilaksanakan pada tataran masyarakat dengan dukungan pemerintah.

Hasil perencanaan kemudian diverifikasi dan dikonsolidasi secara berjenjang dari tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten, dengan demikian seluruh kegiatan yang direncanakan dapat dipantau dan pendanaan yang tumpang tindih dapat diminimalkan. Rencana yang telah disusun, ditindaklanjuti dengan pelaksanaan fisik yang dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat. Masyarakat secara luas diharapkan turut berperan serta aktif dalam pelaksanaan, baik sebagai pelaksana ataupun sebagai pengawas. Sehingga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program dapat diwujudkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa peranan komunikasi organisasi dalam keberhasilan pemberdayaan masyarakat Pekon Tugupapak Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus adalah sebagai berikut:

1. Peran informatif

OMS Karyamuda Pekon Tugupapak dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi. Maksudnya, seluruh anggota OMS Karyamuda memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik dan tepat waktu. Informasi yang didapat memungkinkan setiap anggota dapat melaksanakan tahapan program pemberdayaan melalui RIS PNPM secara lebih pasti. Dari sisi manajemen membutuhkan informasi untuk menjalankan tahapan program RIS PNPM ataupun guna mengatasi konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan masyarakat Pekon Tugupapak membutuhkan informasi untuk melaksanakan pekerjaan infrastruktur.

2. Peran regulatif

Peran ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku untuk OMS Karyamuda dan aturan dari para pengurus OMS Karyamuda. Terdapat dua hal yang berpengaruh terhadap peran regulatif, yaitu: a. Berkaitan dengan orang-orang yang berada dalam OMS Karyamuda dan para fasilitator program, yaitu mereka yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan. Juga memberi perintah atau intruksi supaya perintah-perintahnya dilaksanakan sebagaimana semestinya.

3. Berkaitan dengan pesan. Pesan-pesan regulatif pada dasarnya berorientasi pada implementasi program pemberdayaan. Artinya, masyarakat Pekon Tugupapak membutuhkan kepastian peraturan tentang pekerjaan yang boleh dan tidak boleh untuk dilaksanakan.

4. Peran persuasif.

Dalam mengatur OMS Karyamuda, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Adanya kenyataan ini, maka OMS Karyamuda yang lebih suka untuk mempersuasi masyarakat Pekon Tugupapak daripada memberi perintah. Sebab pekerjaan infrastruktur fisik yang dilakukan secara sukarela oleh masyarakat pekon akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar terhadap bangunan infrastruktur mereka.

a. Peran integratif

OMS Karyamuda Pekon Tugupapak berusaha untuk menyediakan saluran yang memungkinkan masyarakat dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik. Ada dua saluran komunikasi yang dapat mewujudkan hal tersebut, yaitu: a. Saluran komunikasi formal seperti papan pengumuman program dan laporan kemajuan program. b. Saluran komunikasi informal seperti perbincangan antar pribadi antar warga masyarakat pekon.

DAFTAR PUSTAKA

Arni, Muhamad. 2009. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Carnea. 1988. Pengantar Ilmu Komunikasi, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Moleong, L.J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nasir, Moh. 1988. Metode Penelitian. Jakarta: Gahala Indonesia.

Pace, R Wayne dan Faules, Don F. 1998. Komunikasi Organisasi Strategi meningkatkan kinerja perusahaan. Bandung : Remaja Rosdakarya

Ruber, Brent D. 1988. *Communication in Action: Building Speech Competencies*. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Sendjaja, Sasa Djuarsa, 1994, Pengantar Komunikasi : Jakarta, Universitas Terbuka.

Tjokrowinoto, Moeljarto. 1987. *Politik Pembangunan: Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Wiryanto, 2005, Pengantar Ilmu Komunikasi, Jakarta. PT. Grasindo.

BIODATA PENULIS

Dr. Wawan Hernawan, M.Pd

Dosen pada Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Bandar Lampung

Noning Verawati, MA

Dosen pada Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Bandar Lampung

M. Fikri Akbar, S.I.Kom, M.Si, M.M

Dosen pada Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
Bandar Lampung

Choirul Fajri, S.I.Kom, MA

Dosen pada Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

Romika Junaidi, S.Hum, MA

Alumni Pasca Sarjana Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Novi Rahma Ilmiati, S.I.Kom, MA

Alumni Pasca Sarjana Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

PEDOMAN PENULISAN DAN PENGIRIMAN NASKAH JURNAL INTERKATIF

1. Naskah berupa hasil penelitian, baik penelitian lapangan maupun kajian pustaka, atau yang setara dengan hasil penelitian, serta kajian konseptual di bidang komunikasi.
2. Naskah harus asli dan belum pernah diterbitkan di jurnal ataupun media penerbitan yang lain.
3. Judul naskah harus menggambarkan penelitian yang dilakukan, spesifik, efektif, lugas dan jelas, judul berbahasa Indonesia maksimal terdiri dari 12 kata dan judul berbahasa Inggris maksimal 10 kata.
4. Nama penulis ditulis dengan lengkap tanpa gelar akademik/profesional, dilengkapi dengan nama lembaga asal serta alamat korespondensi (email penulis) dan ditempatkan dibawah judul naskah.
5. Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan format penulisan huruf Times New Roman, ukuran font 12, spasi 1.
6. Abstrak ditulis dalam satu paragraf dengan format yang menjorok lebih ke dalam dengan jumlah kata 75-100 kata dan disertai dengan tiga sampai lima kata kunci.
7. Naskah ditulis dengan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris dengan jumlah halaman antara 15-20 halaman.
8. Naskah diketik dalam format huruf Times New Roman, ukuran font 12, spasi 1,5, kertas A4 dan margin kanan-kiri-atas-bawah 3cm.
9. Sistematika penulisan naskah penelitian adalah sebagai berikut:
 - Judul
 - Nama penulis dan asal lembaga serta alamat korespondensi
 - Abstrak dan kata kunci
 - Pendahuluan (tanpa subjudul)
 - Metode Penelitian
 - Hasil dan Pembahasan (bisa terdiri dari beberapa subjudul yang disesuaikan dengan materi tulisan)
 - Kesimpulan dan saran
 - Daftar Pustaka
10. Sistematika Penulisan naskah kajian konseptual:
 - Judul
 - Nama penulis dan asal lembaga serta alamat korespondensi
 - Abstrak dan kata kunci

- Pendahuluan (tanpa subjudul)
- Subjudul-subjudul yang dipergunakan
- Penutup
- Daftar Pustaka

11. Tabel dan gambar harus diberi judul serta keterangan penomoran dan sumber yang jelas di bagian bawah tabel dan gambar tersebut dan diketik dengan spasi tunggal.

12. Daftar pustaka hanya memuat sumber-sumber pustaka yang benar-benar disebut dalam isi naskah. Daftar pustaka ditempatkan di halaman terkahir minimal 80% berupa pustaka terbitan 10 tahun terakhir. Daftar pustaka yang digunakan dapat berupa artikel-artikel penelitian dalam jurnal atau laporan penelitian.

13. Penulisan daftar pustaka diurutkan secara alfabetis dan diketik dengan spasi satu dan disusun dengan tata cara: Nama belakang, nama depan. Tahun penerbitan. Judul buku (cetak miring). Kota: Penerbit.

Contoh:

Solis, Brian., Dreirdere Breakenridge. 2009. *Putting The Public Back In Public Relations: How Social Media is Reinventing The Aging Business of PR*. USA: Pearson Education

14. Perujukan dan pengutipan menggunakan teknik rujukan berkurung (nama akhir, tahun). Pencantuman sumber pada kutipan langsung dibuat dengan catatan perut, hendaknya disertai keterangan tentang nomor halaman tempat asal kutipan.

Contoh:

Putra,1999:14-15

Holthauzen, 2006: 257

K. Yin, 2004:13

15. Naskah jurnal serta biodata penulis dikirim melalui email verasugiyono02@gmail.com naskah diterima paling lambat dua bulan sebelum bulan terbit.

16. Redaksi berhak menyunting tulisan mengubah dan memperbaiki ejaan, tata tulis, dan tata bahasa naskah yang dimuat tanpa mengurangi substansi materi naskah.



ISSN 2087-2070

KOM & REALITAS SOSIAL

JURNAL ILMU KOMUNIKASI
Volume12, Nomor12, April 2016

Diterbitkan Oleh :
Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Bandar Lampung
BANDAR LAMPUNG - INDONESIA